

## HUBUNGAN KUALITAS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN EFEKTIVITAS PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KELURAHAN (SIKel) DI KELURAHAN LANCIRANG

Desty Kurnia Sari<sup>1</sup>, Kamaruddin Sellang<sup>2</sup>, Muhammad Ikbal<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia

Email: [destykurniasari503@gmail.com](mailto:destykurniasari503@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara kualitas keterbukaan informasi publik dengan efektivitas pemanfaatan Sistem Informasi Kelurahan (SIKel) di Kelurahan Lancirang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara tingginya tingkat akses masyarakat terhadap sistem informasi dengan keterbatasan ketersediaan informasi publik yang lengkap dan terstruktur. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 60 responden yang pernah mengakses SIKel, dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan uji korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas keterbukaan informasi publik berada pada kategori cukup baik hingga baik, meskipun masih terdapat kelemahan pada aspek kelengkapan dan relevansi informasi. Sementara itu, efektivitas pemanfaatan sistem informasi juga belum sepenuhnya optimal. Hasil uji korelasi menunjukkan adanya hubungan positif dengan tingkat hubungan sedang antara kualitas keterbukaan informasi publik dan efektivitas pemanfaatan sistem informasi. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pemanfaatan SIKel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik yang berkualitas menjadi faktor penting dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan sistem informasi di tingkat kelurahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas informasi, terutama dalam aspek kelengkapan, relevansi, dan kemudahan akses.

**Kata Kunci:** Keterbukaan Informasi Publik, Sistem Informasi Kelurahan, Efektivitas, Transparansi, Pelayanan Publik.

### Abstract

*This study aims to examine the relationship between the quality of public information disclosure and the effectiveness of the utilization of the Village Information System (SIKel) in Lancirang Village. The study is motivated by the discrepancy between the high level of public access to the system and the limited availability of complete and structured public information. A quantitative approach with a correlational research design was employed. Data were collected through questionnaires distributed to 60 respondents who had accessed SIKel, using purposive sampling. Data analysis was conducted using descriptive statistics and correlation testing. The results indicate that the quality of public information disclosure is categorized as moderately good to good, although several aspects, particularly completeness and relevance of information, remain suboptimal. Meanwhile, the effectiveness of system utilization has not yet reached its full potential. The correlation test reveals a positive relationship with a moderate strength between the quality of public information disclosure and the effectiveness of system utilization. This finding suggests that improvements in the quality of public information disclosure contribute to increased effectiveness in the utilization of SIKel. This study concludes that high-quality public information disclosure plays a crucial role in*

*optimizing the use of information systems at the village level. Therefore, efforts are needed to enhance information quality, especially in terms of completeness, relevance, and accessibility.*

**Keywords:** *Public Information Disclosure, Village Information System, Effectiveness, Transparency, Public Service.*

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital mendorong perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, pemanfaatan sistem informasi menjadi elemen penting, tidak hanya sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana utama dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta peningkatan kualitas layanan (Ismawan & Irma, 2024). Implementasi sistem informasi yang efektif mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menerapkan prinsip *good governance*, terutama pada aspek transparansi dan akuntabilitas (Ilham et al., 2020). Secara regulatif, kewajiban keterbukaan informasi publik telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang mengharuskan setiap badan publik menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa akses terhadap informasi merupakan hak publik yang harus dipenuhi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah di berbagai tingkatan, termasuk kelurahan, dituntut untuk mengoptimalkan penggunaan sistem informasi berbasis digital dalam mendukung keterbukaan informasi (Wijaya et al., 2025).

Sebagai bagian dari implementasi digitalisasi pelayanan publik, Kelurahan Lancirang telah mengembangkan Sistem Informasi Kelurahan (SIKel) yang dapat diakses secara daring. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa menu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) belum menyediakan informasi yang seharusnya bersifat wajib, seperti informasi berkala, serta-merta, dan setiap saat. Selain itu, informasi mendasar mengenai profil kelembagaan, seperti visi dan misi, juga belum tersedia. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan sistem informasi sebagai sarana keterbukaan informasi publik belum berjalan secara optimal.

Di sisi lain, keberadaan informasi pada menu berita menunjukkan bahwa aparaturnya kelurahan memiliki kemampuan dalam mengelola konten sistem informasi. Oleh karena itu, permasalahan yang terjadi bukan disebabkan oleh keterbatasan teknis, melainkan lebih pada belum optimalnya pengelolaan informasi yang bersifat strategis dan wajib disediakan kepada masyarakat. Keterbatasan informasi yang tersedia dalam sistem juga berdampak pada efektivitas pelayanan publik (Renanda & Rosidin, 2025). Masyarakat masih mengalami kendala dalam memperoleh informasi tertentu, seperti data bantuan sosial, sehingga harus melakukan verifikasi secara langsung ke kantor kelurahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem informasi belum sepenuhnya mampu memberikan kemudahan akses, efisiensi layanan, serta kepastian informasi bagi masyarakat.

Dari sisi akademik, kajian mengenai keterbukaan informasi publik dan sistem informasi pemerintahan umumnya dilakukan secara terpisah atau berfokus pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara kualitas keterbukaan informasi publik dengan efektivitas pemanfaatan sistem informasi pada tingkat kelurahan masih terbatas, khususnya dalam konteks Kelurahan Lancirang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas keterbukaan informasi publik serta menguji hubungan antara kualitas keterbukaan informasi publik dengan efektivitas pemanfaatan Sistem Informasi Kelurahan di Kelurahan Lancirang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan kajian administrasi publik,

khususnya terkait optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung keterbukaan informasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi publik merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel (Ali Khaidir, 2020). Dalam konteks perkembangan digital, administrasi publik mengalami transformasi menuju *digital governance*, dimana pemanfaatan teknologi informasi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta transparansi pemerintah (Sangaji & Irianto, 2025).

Kualitas keterbukaan informasi publik di Kelurahan Lancirang merupakan hasil dari sinergi kebijakan, struktur organisasi, manajemen, etika, dan lingkungan yang mendukung, serta bermuara pada akuntabilitas kinerja pemerintahan. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi yang didukung oleh struktur dan pengelolaan yang baik, etika aparatur, serta lingkungan yang kondusif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong efektivitas pemanfaatan Sistem Informasi Kelurahan (SIKel) sebagai instrumen pelayanan publik berbasis digital.

Transformasi digital di pemerintahan desa/kelurahan melalui penggunaan Sistem Informasi Kelurahan (SIKel) merupakan bagian dari perkembangan administrasi publik era digital (*digital governance*) (Mardinata et al., 2023). Penggunaan SIKel ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, terutama dalam hal penyediaan informasi yang cepat, akurat, dan transparan (Sakir, 2024).

### 1. Keterbukaan Informasi Publik

Kualitas keterbukaan informasi publik merujuk pada tingkat sejauh mana informasi yang dikelola oleh badan publik dapat diakses, dipahami, dipercaya, dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara tepat waktu dan akurat. Konsep ini tidak hanya menekankan pada keterbukaan semata, tetapi juga pada mutu informasi yang disampaikan. Menurut Heald (2006), kualitas keterbukaan informasi publik tercermin dari transparansi yang efektif, yaitu ketika informasi tidak hanya tersedia, tetapi juga disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh publik dan memungkinkan terjadinya pengawasan terhadap kinerja pemerintah (Ogan et al., 2024). Sementara itu, Meijer (2013), memandang kualitas keterbukaan informasi sebagai bagian dari transparansi publik yang berkualitas, yang ditandai oleh ketersediaan informasi yang lengkap, akurat, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (Rumbayan, 2024). Informasi yang berkualitas akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Keterbukaan informasi publik merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Wibawa, 2024). Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam perspektif administrasi publik, keterbukaan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan informasi, tetapi juga mencakup interaksi antara pemerintah dan masyarakat (Riziq & Hotijah, 2025). Konsep *openness* menurut Bugaric (2004) mencakup akses informasi sekaligus komunikasi aktif antara pemerintah dan publik (Riziq & Hotijah, 2025). Sejalan dengan itu, Meijer (2013) menyatakan bahwa keterbukaan memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah (Ricky & Rahimallah, 2022).

Kualitas keterbukaan informasi publik menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas transparansi. Heald (2006), menjelaskan bahwa keterbukaan yang berkualitas ditandai oleh informasi yang tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat (Subhan, 2019). Sementara itu, Meijer (2013) menegaskan bahwa kualitas

informasi publik ditentukan oleh kelengkapan, akurasi, relevansi, dan aksesibilitas informasi (Bugaric, 2024). Dalam konteks sistem informasi, kualitas informasi menurut Laudon & Laudon (2020), meliputi beberapa indikator utama, yaitu kelengkapan (*completeness*), akurasi (*accuracy*), ketepatan waktu (*timeliness*), relevansi (*relevance*), dan kemudahan akses (*accessibility*) (Indra, 2021). Indikator-indikator ini menjadi dasar dalam menilai kualitas keterbukaan informasi publik dalam sistem digital pemerintahan. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik yang berkualitas tidak hanya berfungsi sebagai bentuk transparansi, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta efektivitas pelayanan publik berbasis digital.

## 2. Pemanfaatan Sistem Informasi

Pemanfaatan sistem informasi merupakan proses penggunaan teknologi informasi untuk mendukung aktivitas organisasi, pengambilan keputusan, dan peningkatan kinerja pelayanan (Dmp, 2024). Dalam sektor publik, sistem informasi menjadi alat strategis untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kepada masyarakat (Amri et al., 2025). Keberhasilan pemanfaatan sistem informasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada penerimaan pengguna. Salah satu model yang digunakan untuk menjelaskan hal tersebut adalah Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Fred D. Davis (1989).

Model TAM menjelaskan bahwa penggunaan sistem informasi dipengaruhi oleh dua konstruk utama, yaitu *perceived usefulness* (persepsi kegunaan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan). *Perceived usefulness* merujuk pada keyakinan bahwa sistem dapat meningkatkan kinerja, sedangkan *perceived ease of use* berkaitan dengan kemudahan dalam menggunakan sistem (Wicaksono, 2023). Dalam konteks Sistem Informasi Kelurahan (SIKel), pemanfaatan sistem dapat dikatakan efektif apabila masyarakat merasa bahwa sistem tersebut bermanfaat serta mudah digunakan dalam mengakses informasi dan layanan publik (Amri et al., 2025).

## 3. Hubungan Keterbukaan Informasi Publik dengan Pemanfaatan Sistem Informasi

Keterbukaan informasi publik memiliki hubungan yang erat dengan efektivitas pemanfaatan sistem informasi, terutama dalam pelayanan publik berbasis digital (Pramana, 2025). Sistem informasi tidak akan dimanfaatkan secara optimal apabila informasi yang disediakan tidak berkualitas (Indra, 2021). Menurut teori sistem informasi, kualitas informasi merupakan faktor utama yang memengaruhi keberhasilan penggunaan sistem (Nuryana et al., 2024). Informasi yang lengkap, akurat, dan relevan akan meningkatkan kepercayaan pengguna dan mendorong penggunaan sistem secara berkelanjutan.

Selain itu, dalam perspektif TAM, kualitas informasi berpengaruh terhadap persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan (Zainal Arifin, 2020). Informasi yang mudah diakses dan dipahami akan meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan sistem informasi (Kurniawati, 2022). Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa transparansi informasi publik berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan layanan digital pemerintah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat (Firman et al., 2022; Huda et al., 2025). Dengan demikian, semakin tinggi kualitas keterbukaan informasi publik, maka semakin tinggi pula efektivitas pemanfaatan sistem informasi dalam pelayanan publik.

H<sub>1</sub>: Terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas keterbukaan informasi publik dengan efektivitas pemanfaatan Sistem Informasi Kelurahan (SIKel).

## C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional yang bertujuan untuk menguji hubungan antara kualitas keterbukaan informasi publik dan efektivitas pemanfaatan Sistem Informasi Kelurahan (SIKel) (Abdullah, 2022). Penelitian

dilaksanakan di Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selama periode 11 April hingga 11 Mei 2026. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah mengakses atau menggunakan SIKel. Karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti, penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dan Penentuan jumlah sampel mengacu pada pedoman yang dikemukakan oleh Roscoe yang menyatakan bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian berkisar antara 30 sampai 500 responden (Wahyudi, 2023), Sehingga ditetapkan jumlah responden sebanyak 60 orang. Responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu berusia minimal 17 tahun dan memiliki pengalaman dalam mengakses SIKel.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner sebagai instrumen utama, yang disusun berdasarkan indikator variabel penelitian. Selain itu, observasi dilakukan secara daring melalui website SIKel untuk mengidentifikasi ketersediaan dan kelengkapan informasi publik, serta didukung dengan studi pustaka dari berbagai sumber literatur dan regulasi yang relevan. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik variabel, serta analisis inferensial melalui uji korelasi. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji kualitas data yang meliputi uji validitas menggunakan korelasi Pearson Product Moment, dan akan tetapi jika uji normalitas menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal, maka analisis korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Korelasi Spearman Rank Menurut (Sugiyono, 2013) Spearman Rank digunakan ketika hubungan antar variabel tidak memenuhi asumsi distribusi normal dan linier, namun peneliti tetap ingin mengetahui kekuatan dan arah hubungan antar variabel tersebut dan uji reliabilitas dengan koefisien Cronbach Alpha. Selanjutnya, uji prasyarat analisis dilakukan melalui uji normalitas dan uji linearitas untuk menentukan jenis uji korelasi yang digunakan. Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antara variabel kualitas keterbukaan informasi publik (X) dan efektivitas pemanfaatan SIKel (Y). Interpretasi koefisien korelasi didasarkan pada nilai  $r$ , dimana semakin mendekati angka 1 menunjukkan hubungan yang semakin kuat.

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel berikut menampilkan persentase dari setiap indikator yang digunakan dalam penelitian, yang mencerminkan tingkat penilaian responden terhadap aspek kelengkapan, akurasi, ketepatan waktu, relevansi informasi, serta kemudahan akses pada variabel X, dan persepsi kegunaan serta kemudahan penggunaan pada variabel Y. Selain itu, tabel ini juga menyajikan nilai total dan rata-rata persentase sebagai gambaran umum tingkat capaian keseluruhan hasil penelitian.

**Tabel 1. Hasil Pengukuran Variabel X dan Variabel Y**

No	Variabel	Indikator	Persentase (%)
1	Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Kelengkapan Informasi	59,5
		Akurasi Informasi	67,87
		Ketepatan Waktu Penyajian Informasi	66,12
		Relevansi informasi	69,5
		Kemudahan Akses	73,25
2	Efektivitas Pemanfaatan Sistem Informasi Kelurahan	<i>Perceived Usefulness</i> (Kegunaan)	79,5
		<i>Perceived Ease of Use</i> (kemudahan pengguna)	76,16
<b>Jumlah</b>			<b>491,9</b>
<b>Persentase %</b>			<b>70,27</b>

*Sumber: Hasil Olah Data, 2026*

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kualitas keterbukaan informasi publik di Kelurahan Lancirang berada pada kategori cukup baik hingga baik dengan nilai rata-rata sebesar 70,27%. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah kelurahan telah berupaya menyediakan informasi kepada masyarakat melalui Sistem Informasi Kelurahan (SIKel), meskipun masih terdapat beberapa kelemahan pada indikator tertentu, terutama pada aspek kelengkapan dan relevansi informasi. Kualitas informasi yang belum optimal ini menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan informasi publik belum sepenuhnya terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan dalam kebijakan publik

Di sisi lain, efektivitas pemanfaatan SIKel juga berada pada kategori cukup baik, namun belum optimal. Hal ini tercermin dari masih adanya kendala yang dialami masyarakat dalam memperoleh informasi secara lengkap dan cepat melalui sistem, sehingga dalam beberapa kondisi masyarakat masih harus datang langsung ke kantor kelurahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kualitas informasi yang disajikan (Indra, 2021).

**Tabel 2. Analisis Korelasi**

		X	Y
Spearman's rho	X	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.
		N	60
	Y	Correlation Coefficient	.491**
		Sig. (2-tailed)	.000
		N	60

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil olah SPSS, April 2026

Berdasarkan hasil uji korelasi, diperoleh nilai koefisien sebesar  $r = 0,491$ , yang menunjukkan adanya hubungan positif dengan tingkat kekuatan sedang antara kualitas keterbukaan informasi publik dan efektivitas pemanfaatan sistem informasi. Artinya, peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik cenderung diikuti oleh peningkatan efektivitas pemanfaatan SIKel oleh masyarakat. Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kualitas informasi berpengaruh terhadap tingkat penggunaan sistem informasi oleh pengguna (Davis, 1989; Firman et al., 2022).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas keterbukaan informasi publik memiliki peran yang signifikan dalam menentukan efektivitas pemanfaatan sistem informasi kelurahan. Nilai korelasi sebesar 0,491 mengindikasikan bahwa hubungan yang terjadi bersifat positif dan moderat, yang berarti bahwa kualitas informasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong penggunaan sistem informasi oleh masyarakat. Dalam perspektif teori sistem informasi, kualitas informasi merupakan determinan utama keberhasilan sistem informasi, terutama dalam meningkatkan kepercayaan dan penggunaan sistem oleh pengguna (Indra, 2021). Informasi yang lengkap, akurat, dan relevan akan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem. Sebaliknya, apabila informasi yang disediakan tidak memenuhi kebutuhan pengguna, maka sistem informasi cenderung tidak dimanfaatkan secara optimal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan pada aspek kelengkapan dan relevansi informasi di dalam SIKel.

Jika dianalisis menggunakan Technology Acceptance Model (TAM), kualitas informasi berperan dalam membentuk persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) (Davis, 1989). Informasi yang tidak lengkap atau tidak diperbarui secara berkala akan menurunkan persepsi manfaat sistem, sehingga masyarakat tidak terdorong untuk menggunakan sistem secara maksimal. Selain itu, informasi yang sulit diakses juga akan menurunkan persepsi kemudahan penggunaan, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat pemanfaatan sistem.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan sistem dan kualitas informasi yang disajikan. Meskipun sistem informasi telah tersedia, namun belum seluruh informasi penting dapat diakses oleh masyarakat secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada pengelolaan informasi, bukan pada aspek teknologi semata. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa keberhasilan sistem informasi sangat dipengaruhi oleh kualitas konten informasi yang disediakan (Meijer, 2013; Heald, 2006; Bugaric, 2024). Nilai korelasi yang berada pada kategori sedang (0,491) juga menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang turut memengaruhi efektivitas pemanfaatan sistem informasi. Faktor-faktor tersebut meliputi tingkat literasi digital masyarakat, kemampuan aparatur dalam mengelola sistem, serta kualitas infrastruktur teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas keterbukaan informasi publik merupakan faktor penting, namun perlu didukung oleh faktor lain agar pemanfaatan sistem dapat mencapai tingkat optimal (Davis, 1989; Laudon & Laudon, 2020).

Dalam perspektif good governance, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Keterbukaan informasi yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong partisipasi publik dalam pelayanan pemerintahan (World Bank, 2004). Temuan penelitian ini memperkuat bahwa transparansi informasi tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada peningkatan efektivitas penggunaan sistem informasi publik. Selain itu, hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik berpengaruh terhadap pemanfaatan layanan digital pemerintah dan tingkat kepercayaan masyarakat (Firman et al., 2022; Huda et al., 2025). Dengan demikian, peningkatan kualitas informasi publik merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas sistem informasi di tingkat kelurahan.

## E. KESIMPULAN

Kualitas keterbukaan informasi publik di Kelurahan Lancirang berada pada kategori baik dengan nilai sebesar 70,27%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kualitas informasi, seperti akurasi, ketepatan waktu, dan kemudahan akses, telah terpenuhi. Namun demikian, masih terdapat kelemahan pada aspek kelengkapan dan relevansi informasi, khususnya terkait ketersediaan informasi penting dalam sistem. Efektivitas pemanfaatan Sistem Informasi Kelurahan (SIK<sub>el</sub>) juga berada pada kategori cukup baik hingga baik, namun tingkat penggunaannya masih relatif rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem telah memberikan manfaat dan kemudahan, pemanfaatannya oleh masyarakat belum optimal. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara kualitas keterbukaan informasi publik dengan efektivitas pemanfaatan sistem informasi, dengan nilai koefisien korelasi sebesar  $r = 0,491$  yang berada pada kategori sedang. Hal ini berarti bahwa peningkatan kualitas informasi cenderung diikuti oleh peningkatan efektivitas pemanfaatan sistem, meskipun pengaruhnya tidak bersifat dominan. Dengan demikian, kualitas keterbukaan informasi publik memiliki peran penting dalam mendukung pemanfaatan sistem informasi kelurahan, namun optimalisasi penggunaannya juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti literasi digital masyarakat, intensitas sosialisasi, serta kebiasaan dalam mengakses layanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Taqwin, M., ... & Sari, M. E. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata kelola pemerintahan desa terhadap peningkatan pelayanan publik di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602-614.
- Amri, A., & Nasution, M. I. P. (2025). Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Untuk

- Meningkatkan Efisiensi Operasional Pada Organisasi Publik. *International Journal of Sharia Business Management*, 4(5), 523-530.
- Arifin, Z. (2017). *Adopsi teknologi untuk keunggulan daya saing*. Jakarta: PT. PLN (Persero).
- Bugaric, B. (2004). Openness and transparency in public administration: challenges for public law. *Wis. Int'l LJ*, 22, 483.
- Erwin, E., Judijanto, L., Anggraeni, A. F., Nurfaidah, N., Damayanti, F., Sari, H. E., & Indrayani, N. (2024). *Sistem Informasi Manajemen: Teori, Prinsip dan Penerapan*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Huda, D. N., Sirait, L., Fandhica, R., & Romdoni, M. R. (2025). Implementation of User-Centered Design (UCD) Method on the Design of Real-Time Coffee Shop Reservation Application. *Jurnal Bangkit Indonesia*, 14(1), 41-46. <https://doi.org/10.52771/bangkitindonesia.v14i1.432>
- Ilham, A. R., Dewi, Y. S., & Gusti, R. (2020). *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sebagai Pilar Good Governance: Refleksi Tata Kelola Pemerintahan Daerah*.
- Indra, Y. A. (2021). Istem Informasi Akuntansi. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2).
- Ismawan, D., & Irma, A. (2024). Pemanfaatan Website Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 158-175.
- Kurniawati, S., & Mursyidah, L. (2023). Efektivitas sistem informasi dalam pelayanan publik Desa Kalidawir Kabupaten Sidoarjo. *Musamus Journal of Public Administration*, 6(1), 613-630.
- Mardinata, E., Cahyono, T. D., & Muhammad Rizqi, R. (2023). Transformasi Digital Desa Melalui Sistem Informasi Desa (SID): Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 73–81. <https://doi.org/10.38043/parta.v4i1.4402>
- Nuryana, M. L., Ibrahim, T., & Arifudin, O. (2024). Implementasi dan transformasi sistem informasi manajemen di era digital. *Jurnal Tahsinia*, 5(9), 1325-1337.
- Pramana, I. G. A. (2025). Implementasi Sistem Informasi Desa untuk Meningkatkan Transparansi dan Pelayanan Publik di Desa Tertinggal. *Journal of Community Action*, 1(2), 34-51.
- Renanda, A. A., & Rosidin, A. (2025). Efektivitas pelayanan digital dalam mempermudah birokrasi dan pengelolaan data publik. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(8), 1651-1657. <https://doi.org/https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i8.310>
- Ricky, & Rahimallah, M. T. A. (2022). Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62–75.
- Riziq, M., & Hotijah, S. (2025). Penerapan Prinsip Hukum Administrasi Negara dalam Penguatan Keterbukaan Informasi Publik di Era Digitalisasi Birokrasi. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 5(1), 1-20.
- Sakir, A. R. (2024). Tinjauan Literatur: Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*, 6(2), 165–171. <https://doi.org/10.36917/japabis.v6i2.170>
- Sangaji, M. S. J., & Irianto, J. (2025). Transformasi Inovasi Pelayanan Publik menuju Pemerintahan Digital. *Jejaring Administrasi Publik*, 17(1), 54–70. <https://doi.org/10.20473/jap.v17i1.72708>
- Subhan, A. (2016). Multidirectional Networks of Government Transparency: A Preliminary Model. *Jurnal Bina Praja*, 8(2), 209-219. <https://doi.org/10.21787/jbp.08.2016.209-219>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Susila Wibawa, K. C. (2024). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 218–234. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234>
- Trijayanto, D., & Rahmawati, R. (2022). Public Service Transformation Through Applications “Lapor” in the Context of E-Government in Digital Era. *ASPIRATION Journal*, 3(2), 120-136.
- Wahyudi, Avianti, W., Martin, A., Andriyani, N., Prihatiningsih, D., Misesani, D., Yufrinalis, M., ... & Sukwika, T. (2023). *Metode Penelitian (Dasar Praktik dan Penerapan Berbasis ICT)*. Mifandi Mandiri Digital.
- Wicaksono, S. R. (2023). *Teori Dasar Technology Acceptance Model (TAM)*. Malang: Seribu Bintang.
- Wijaya, R., Nur, R. M., & Hidayat, R. (2025). Optimalisasi sistem informasi kelurahan berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan kualitas layanan publik di Kelurahan Lubuk Begalung Kota Padang. *Jurnal Pesona Nusantara*, 1(2), 22-29.